

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, A. D., Yuliarti, Y., Permana, I., & Fajri, H. (2023). Dinamika Pelaksanaan Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 3(3), 74-80.
- Amaliatulwalidain, A. (2016). DEMOKRASI LOKAL DI SUMATERA BARAT Memahami Pendekatan “Self Governing Community” Pada Sistem Pemerintahan Nagari Modern di Minangkabau. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2(1)
- Aromatica, D., Heru, N., Ida, W, dan Entang, A. “Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat.” *Jurnal AKP* 8, no. 2 (2018): 49.
- Aromatica, D., Nurasa, H., Widianingsih, I., & Muhtar, E. A. (2018). Analisis Kelembagaan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 156.
- Anwar, C., & Hanim, Z. (2025). Pengembangan Kapasitas Lembaga (Strategi dan Kebijakan untuk Peningkatan Kualitas Sistem Layanan dan Kelembagaan). AMC News, Kabupaten Agam, Kecamatan Lubuk Basung, 16 Oktober 2025
- Agam, AyoSumbar.id, 20 Agustus 2025
- Ady, H, Ilma,F , dan Ashar, M. “Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa,” n.d.
- Badri, A. (2025). Analisis Yuridis Tentang Peran Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Peningkatan Demokrasi di Kecamatan Tiumbang Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(3), 1084-1093.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat 2024.

- Darusalam, Muhammad Alu, Fakultas Hukum, dan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. "A. Pendahuluan" 1, no. 2 (2024).
- Dianti, I. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Teknologi*, 1(2), 31-36
- Evandri, S., Muchtar, H., Fatmariza, F., & Bakhtiar, Y. (2023). Peranan Badan Musyawarah Nagari dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat. *Journal of Civic Education*, 6(2), 129-136.
- Grindle, Merilee S. *Getting Good Government*, 1997.
- Fiza, A. M, Implementasi Kewenangan Badan Musyawarah Nagari Simpang Gunung Tapan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017.
- Imanuel, J dan Edward, M.B, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Pada Desa Tabore Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas)" 12, no. 1 (2025): 23–28.
- Jurnal Christensen, R. K, dan Gazley, B. "Capacity For Public Administration (2008)" 265–279.
- Lina, R dan Dony, W. F, "Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise 3" (2018): 4.
- Merilee S. G, *Getting Good Government*, 1997. Halaman 3-10
- Morgan, P. (2006). The concept of capacity. *European Centre for Development Policy Management*, 1(19), 826-840.
- Muhammad, A. (2016). *Peran Badan Musyawarah Nagari (Bamus) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Di Nagari Canduang Koto Laweh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Masyarakat Dan, Desa Pmd, dan Kabupaten Pelalawan, "BERBASIS WEB DI DINAS PEMBERDAYAAN,".

Peraturan Daerah Agam Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 31 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Nagari

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

Pratama, M, Asyraf.(2020). “Fungsi Pengawasan Badan Musyawarah (Bamus) di Nagari Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Badan Musyawarah di Nagari Guguak Tinggi Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam,”

Putra, E. M. (2025). Konsep umum penelitian kualitatif pada ranah pendidikan. *Dahzain Nur*, 15(1), 10-17.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.

Rahmadani, A. (2021). Pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Padangsidempuan periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 14(02), 71-85.

Rahmat, H, “Pengaruh Kapasitas Organisasi , Komitmen Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua” 18, no. 2018 (2022): 365–79

Rahayu, Sri, Sri Rahayu,bakaba, Jurnal Pendidikan Sejarah.(2018) “Jurnal Bakaba Volume 7, Nomor 2, Bulan Desember, 2018 JUDUL ARTIKEL LENGKAP” 21–30.

Septiani, R. A. D., & Wardhana, D. (2022). Implementasi program literasi membaca 15 menit sebelum belajar sebagai upaya dalam meningkatkan minat membaca. *Jurnal Perseda: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2), 130-137.

Sri, S., Yuwanto, Y., & Sundarso, S. (2017). Capacity Building as Accelerator for

Improving Autonomous Region Recently Knows as (DOB): Case Study in Seluma Distrcit Bengkulu Province, Indonesia.

Sugiono. 2013. Alfabeta *Metode Kualitatif,Kuantitatif Dan R&D*. Jl. Gegerkalong Hilir No.84 Bandung: Alfabeta.

Sihombing, R. D. (2024). OPTIMIZATION OF THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIONAL BODY IN THE VILLAGE GOVERNMENT SYSTEM REVIEWED FROM THE PRINCIPLE OF CHECK AND BALANCE. *NOMOI Law Review*, 5(1), 55-69.

Sandra, K dan Adianto, “PUBLIKA : Kapasitas DLHK Dalam Implementasi Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2023 di Kota Pekanbaru” 11, no. 1 (2025).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang dipadukan dengan Perubahan 1.2.3, dan 4.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Usman, N. A. ., & Yaya, R. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Peran Perangkat Desa terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Manajemen Dinamis*, 1(2), 100–108.

Waruwu, M. (2024). Pendekatan penelitian kualitatif: Konsep, prosedur, kelebihan dan peran di bidang pendidikan. *Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5(2), 198-211.